
**PENGARUH PENDAPATAN EKONOMI, PENDAPATAN DAERAH TERHADAP
ANGGARAN BELANJA MODAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

Oleh :

Arga Christian Sitohang

Ekonomi dan Bisnis/ Ekonomi Pembangunan, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : argasitohang@untag-sby.ac.id

M. Rizal Amri Chusen

Ekonomi dan Bisnis/ Ekonomi Pembangunan, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : rizal.amri20@gmail.com

Habibur Rohman

Ekonomi dan Bisnis/ Ekonomi Pembangunan, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : kingmamen5@gmail.com

.Article Info

Article History :

Received 16 July - 2022

Accepted 25 July - 2022

Available Online

31 July - 2022

Abstract

The economic crisis that hit the Republic of Indonesia since 1997 had an impact on almost all aspects and sectors of life. This impact affects not only the private sector such as the capital market but also the public sector (government) such as local governments. Regional budgets are financial plans that form the basis of public services. In Indonesia, the regional budget document is called the regional revenue and expenditure budget (APBD), for both provinces and districts and cities. 32/2004 it is stated that for the implementation of the authority of local governments, the central government will transfer balancing funds consisting of the General Allocation Fund (DAU), the Special Allocation Fund (DAK) and the regional share of the revenue-sharing fund consisting of taxes and natural resources. Allocating funds in the form of a capital expenditure budget in APED will increase fixed assets. This capital expenditure allocation is based on the regional need for facilities and infrastructure, both for the smooth running of the government's implementation tasks and for public facilities. Therefore, in an effort to improve the quality of public services, local governments should change the composition of their spending. So far, regional expenditures have been mostly used for routine expenditures which are relatively less productive. In this study, researchers used a descriptive type of research, because the research conducted was based on research aimed at explaining a phenomenon, empirically. Documentation method is data used through literature study, namely data collection by studying books or reading materials that are related to the problems being studied. This research uses variables and operational definitions as follows. Capital expenditures are direct expenditures used to finance investment activities (add assets). Economic growth is the process of increasing per capita output proxied by Gross Regional Domestic Product Per Capita PAD (Regional Original Income) Is Regional Aili Income which consists of Regional Tax Results, Regional Levies, Income from Regional Company Profits and other Legitimate Income DAU (Untum Allocation Fund) is a universal transfer from the central government to regional governments to overcome horizontal inequality with the aim of equitable distribution of financial capacity between regions. ,6920.05 so it

can be concluded that local revenue has no effect on the capital expenditure of the Central Java provincial government. Any increase in local revenue has no effect on the capital expenditure of the Central Java provincial government in the 2017-2021 period. put forward by From the previous section, it can be concluded in this study that the income of the two regions, economic growth has no effect on the capital expenditure budget of the Central Java provincial government with a coefficient value of -5.92, which means that if the regional income variable does not change or remains, then the capital expenditure budget Central Java Province-5.92% and a regression coefficient of 0.210, which means that an increase in Aili 1's income has no effect on increasing the capital expenditure of the Central Java provincial government by 0.210. The significant effect can be seen from the thirung table value (0.4360,056) at alpha 560.05) while the coefficient of determination value is 0.059 this value states that the Central Java provincial government's capital expenditure of 05.99% is influenced by regional income and the rest influenced by other variables outside this researcher.

Keyword :

*Economic Income, Regional
Original Revenue, Capital
Expenditure Budget)*

1. PENDAHULUAN

Krisis ekonomi yang melanda negara republic indonesia sejak tahun 1997 membawa dampak hampir pada semua aspek atau sector kehidupan. Dampak tersebut menimpa tidak hanya sector privat seperti pasar modal tetapi juga pada sector public (pemerintah) seperti pemerintah daerah. Dampak yang terjadi lebih bersifat dampak negative seperti bertambahnya tingkat pengangguran dan kemiskinan, walaupun ada pula yang berdampak positif seperti meningkatnya nilai ekspor beberapa komoditi yang berakibat meningkatnya pendapatan para penghasil komoditi tersebut.

Dampak negative krisis ekonomi terjadi pula pada sector anggaran pendapatan belanja negara (APBN) yakni menjadi labilnya sector pendapatan yang pada gilirannya membawa dampak tersebut pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Hal ini terjadi karena alokasi dana dari APBN untuk APBD menjadi labil pula. Dengan kata lain factor ketidakpastian akan penerimaan dari pemerintah pusat menjadi lebih tinggi. Akibat selanjutnya tingkat kepastian akan jumlah besarnya belanja menjadi lebih tinggi pula. Kondisi ini menjadi lebih memprihatinkan pada daerah yang

tingkat pendapatan asli daerah (PAD) nya rendah. PAD yang rendah berarti ketergantungan pada pemerintah pusat dan atau pemerintah provinsi akan lebih tinggi. Hal ini berarti bahwa dengan adanya krisis ekonomi akan berpengaruh pada pendapatan (penerimaan) dan belanja atau (pengeluaran) daerah tingkat II (kab/kota).

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelayanan public. Di indonesia, dokumen anggaran daerah disebut anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. APBD pada hakekatnya adalah merupakan salah satu instrument kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh sebab itu pemerintah daerah Bersama dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) harus berupaya secara nyata dan terstruktur untuk menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan keadaan riil masyarakat sesuai potensi dan kondisi masing-masing daerah. Pencerminkan dari kebijakan tersebut terungkap dari komposisi komponen daerah APBD.

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum di UU otonomi daerah No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang telah menggantikan UU No. 22 tahun 1999. Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah, dimulai secara efektif mulai tanggal 1 Januari 2001. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Desentralisasi sendiri mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan dan pemeliharaan yang serasi antara pusat dan daerah.

Dalam UU No. 32/2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bagian daerah dari dana bagi hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Disamping dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan dan lain-lain pendapatan.

Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran tugas pelaksanaan pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Perubahan alokasi belanja ini juga ditujukan untuk pembangunan berbagai fasilitas modal. Pemerintah perlu memfasilitasi berbagai aktivitas peningkatan perekonomian, salah satunya dengan membuka kesempatan untuk berinvestasi. Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi ini. Dalam penelitian Darwanto dan Yulia Yustikasari menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak

yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah. Dalam penelitian Darwanto dan Yulia Yustikasari menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk dilakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, dalam penelitian Darwanto dan Yulia Yustikasari menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik. Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik.

Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Dari perspektif ini seharusnya Pemerintah Daerah lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi daripada sekedar produk perundangan terkait dengan pajak ataupun retribusi.

Alokasi sumberdaya dalam mengalami distorsi ketika politisi berperilaku korup. Perilaku korup ini terkait dengan peluang untuk mendapatkan keuntungan pribadi pada proyek-proyek yang akan dibiayai dengan anggaran, yakni pengalokasian akan lebih banyak untuk proyek-proyek yang mudah dikorupsi dan memberikan keuntungan politis bagi politisi. Keterbatasan sumberdaya sebagai pangkal masalah utama dalam pengalokasian anggaran sektor publik dapat diatasi dengan pendekatan ekonomi melalui berbagai teknik dan prinsip seperti yang dikenal dalam publik *expenditure management*.

Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangun yang tercermin dari adanya peningkatan PAD. Kesenambungan pemerintah daerah relatif lebih terjamin ketika publik memberikan tingkat dukungan yang tinggi.

Penelitian ini menggunakan kerangka berfikir dari penelitian yang dilakukan Priyo Hari Adi dan David Harianto (2007) dan

menyesuaikan untuk kondisi Indonesia. Penelitian ini berfokus pada pemerintah daerah baik kabupaten Semarang, Demak maupun kota Semarang sendiri yang bertujuan untuk mengetahui alokasi dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD yang didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran tugas pelaksanaan pemerintah maupun untuk fasilitas pelayanan publik.

Penelitian ini berusaha mengetahui adanya pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa secara simultan variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Belanja Modal.

Penelitian ini merupakan replikasi dari Darwanto dan Yulia Yustikasari 2007, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dari obyek yang akan diteliti. Penelitian terdahulu dilakukan di Kabupaten/Kota Se- Jawa Bali sedangkan penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Tengah.

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS

Anggaran Daerah Sector Public

Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam rangka meningkatkan pelayanan public dan didalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah.

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran moneter.

Fungsi anggaran :

1. Alat perencanaan

Sebagai alat perencanaan, anggaran sector public merupakan alat yang digunakan untuk melakukan berbagai perencanaan seperti perumusan tujuan dan kebijakan, program, aktivitas, alokasi dana, dan sumber pembiayaan, serta indicator kinerja dan tingkat pencapaian strategis.

2. Alat pengendalian

Sebagai alat pengendalian, anggaran sector public sebagai instrumen yang dapat mengendalikan terjadinya

pemborosan-pemborosan pengeluaran. Berdasarkan anggaran yang diajukan, pemerintah menyajikan rencana detail tentang semua penerimaan dan pengeluaran yang harus dipertanggung jawabkan kepada publik.

3. Alat kebijakan fiskal

Sebagai alat kebijakan fiskal, anggaran sector public digunakan sebagai instrumen yang dapat mencerminkan arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi, yang akan mendorong memfasilitasi, dan mengkoordinasi kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4. Alat politik

Sebagai alat politik, anggaran sector public merupakan dokumen politik yang berupa komitmen dan kesepakatan antara pihak-pihak eksekutif dan legislative atas penggunaan dana public.

5. Alat koordinasi dan komunikasi

Sebagai alat koordinasi, anggaran sector public merupakan instrument untuk melakukan koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Sebagai alat komunikasi, anggaran sector public berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif.

6. Alat penilai kinerja

Sebagai alat kinerja, anggaran sector public merupakan wujud komitmen dari pihak eksekutif sebagai pemegang anggaran kepada pihak legislative sebagai pemberi wewenang. Kinerja pihak eksekutif sebagai pihak manajer public dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisien pelaksanaan anggaran.

7. Alat pemotivasi

Sebagai alat pemotivasi, anggaran sector public dapat memotivasi pihak eksekutif beserta stafnya untuk bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

8. Alat untuk menciptakan ruang public

Sebagai alat untuk menciptakan , anggaran sektir public merupakan wadah untuk menampung aspirasi dari masyarakat baik kelompok masyarakat yang terorganisir maupun yang tidak terorganisir.

Jenis anggaran :

1. Anggaran operasional
Anggaran yang berisi rencana kebutuhan sehari-hari oleh pemerintah pusat/daerah untuk menjalankan kegiatan pemerintahan. Belanja operasi adalah belanja yang manfaatnya hanya untuk satu periode anggaran dan tidak dimaksudkan untuk menambahkan aset pemerintah. Klasifikasi belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang non-investasi, pembayaran Bunga, hutang, subsidi, dan belanja operasional.
2. Anggaran modal/investasi
Anggaran yang berisi rencana jangka Panjang dan pembelajaan aktiva tetap seperti Gedung, peralatan, kendaraan, perabotan kantor. Belanja modal merupakan bagian dari anggaran modal/investasi.

Proses penyusunan anggaran

Penyusunan dan pelaksanaan anggaran tahunan merupakan rangkaian proses anggaran. Proses penyusunan anggaran bertujuan untuk :

1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi bagian dalam lingkungan pemerintah.
2. Membantu menciptakan efisien dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa public melalui proses pemrprioritasan.
3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
4. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Factor dominan dalam proses penganggaran:

1. Tujuan dan target yang hendak dicapai.
2. Ketersediaan sumber daya atau factor-faktor produksi yang dimiliki pemerintah.
3. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target.

Factor-faktor lain yang mempengaruhi anggaran seperti munculnya peraturan pemerintah terbaru, fluktuasi pasar, perubahan sosial dan politik, serta bencana alam. APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat/DPR (UU keuangan negara, 2002). Tujuan utama proses perumusan anggaran adalah menterjemahkan perencanaan ekonomi pemerintah yang terdiri

dari perencanaan input dan output dalam satuan keuangan. Oleh karena itu proses perumusan anggaran harus dapat menggali dan mengendalikan sumber-sumber dana public. Proses pembuatan satu tahun anggaran tersebut dikenal dengan istilah penganggaran.

Penganggaran atau proses penyusunan anggaran public memiliki karakteristik berbeda dengan panganggaran dalam bisnis. Karakteristik tersebut mencakup (1) karakteristik sumber daya, (2) motif laba, (3) barang public, (4) eksternalitas, (5) penentuan harga pelayanan publik dan (6) perbedaan lain seperti intervensi pemerintah terhadap perekonomian melalui anggaran, kepemilikan atas organisasi dan tingkat kesulitan dalam proses pembuatan keputusan.

Proses Penyusunan Anggaran di Indonesia

Dalam pembahasan anggaran, eksekutif dan legislatif membuat kesepakatan-kesepakatan yang dicapai melalui bargaining (dengan acuan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran) sebelum anggaran ditetapkan sebagai suatu peraturan daerah. Anggaran yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi eksekutif untuk melaksanakan aktivitasnya dalam pemberian pelayanan publik dan acuan bagi legislatif untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan penilaian kinerja eksekutif dalam hal pertanggungjawaban kepala daerah.

Proses penyusunan anggaran dalam anggaran kinerja dimulai dari satuan kerja-satuan kerja yang ada di Pemda, melalui dokumen usulan anggaran yang disebut Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK). RASK kemudian diteliti oleh tim anggaran eksekutif untuk dinilai kelayakannya (berdasar urgensi dan ketersediaan dana) diakomodasi dalam RAPBD yang akan disampaikan kepada legislatif. RAPBD kemudian dipelajari oleh panitia anggaran legislatif dan respon oleh semua komisi dan fraksi dalam pembahasan anggaran.

Proses penyusunan anggaran penganggaran kinerja dimulai dari satuan kerja-satuan kerja yang ada di Pemda, melalui dokumen usulan anggaran yang disebut Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK). RASK kemudian diteliti oleh tim anggaran eksekutif untuk dinilai kelayakannya (berdasarkan urgensi dan ketersediaan dana) diakomodasi dalam RAPBD yang akan disampaikan kepada legislatif. RAPBD kemudian dipelajari oleh panitia anggaran

legislatif dan direspon oleh semua komisi dan fraksi dalam pembahasan anggaran.

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut pandangan ekonom klasik (Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, dan John Stuart Mill), maupun ekonom neoklasik (Robert Solow dan Trevor Swan), pada dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu (1) jumlah penduduk, (2) jumlah stok barang modal, (3) luas tanah dan kekayaan alam, (4) tingkat teknologi yang digunakan (Sukirno, 1985). Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi dibanding apa yang dicapai pada masa sebelumnya.

Menurut Boediono (1985), pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Disini, proses mendapat penekanan karena mengandung unsur dinamis. Para teoretikus ilmu ekonomi pembangunan masa kini, masih terus menyempurnakan makna, hakikat, dan konsep pertumbuhan ekonomi. Para teoretikus tersebut menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dengan pertambahan PDB dan PDRB saja, tetapi juga diberi bobot yang bersifat immaterial seperti kenikmatan, kepuasan, kebahagiaan, nrasa aman, dan tentram yang dirasakan masyarakat luas. (Arsyad, 1999).

PDB adalah total output (produksi) yang dihasilkan oleh suatu perekonomian. Cara perhitungan dalam praktik adalah dengan membagi-bagi perekonomian menjadi beberapa sektor produksi (industrial origin). Jumlah output masing-masing sektor merupakan jumlah output seluruh perekonomian. Hanya saja, ada kemungkinan bahwa output yang dihasilkan suatu sektor perekonomian berasal dari output sektor lain. Atau bisa juga merupakan input bagi sektor ekonomi juga lain lagi.

Dengan kata lain, jika tidak berhati-hati akan terjadi perhitungan ganda (double counting) atau bahkan multiple counting. Akibatnya PDB bisa menggelembung beberapa kali lipat dari angka yang sebenarnya. Untuk menghindarkan hal diatas maka dalam perhitungan PDB dengan metode produksi yang dijumlahkan adalah nilai tambah (value added) masing-masing sektor. Yang dimaksud nilai tambah adalah selisih antara nilai output dengan nilai input antara.

NT= NO-NI

Dimana :

NT = Nilai Tambah NO = Nilai Output

NI = Nilai Input antara

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari sektor perekonomian di wilayah itu. Yang dimaksud dengan nilai tambah bruto adalah nilai produk (output) dikurangi 1 (satu) dengan biaya antara. Nilai tambah bruto mencakup komponen-komponen faktor pendapat (upah dan gaji) bunga sewa, tanah dan keuntungan. Dengan menghitung nilai tambah tersebut dapat diketahui jumlah PDRB nya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Perangkat Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Realitas hubungan fiskal antara pusat dan daerah ditandai dengan tingginya kontrol pusat terhadap proses pembangunan daerah. Ini jelas terlihat dari rendahnya proporsi PAD (pendapat) terhadap total pendapatan daerah dibanding besarnya subsidi yang diberikan dari pusat. Indikator desentralisasi fiskal adalah rasio antara PAD dengan total pendapatan daerah. PAD terdiri atas pajak-pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan dari dinas, laba bersih dari perusahaan daerah (BUMD) dan penerimaan lain-lain.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif, karena penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang bertujuan menjelaskan suatu fenomena, empiris. Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah se Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2005-2006 dengan alasan ketersediaan data. Alasan pemilihan sampel ini adalah daerah Provinsi ini memiliki karakteristik ekonomi dan

geografis yang unik. Dengan keterbatasan SDA, Provinsi Jawa Tengah ini relatif mengandalkan potensi penerimaan lain, khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi (Kuncoro, 2004).

Dalam penelitian ini sampel diambil dengan cara purposive sampling atau sampel bertujuan yaitu peneliti kemungkinan mempunyai target atau tujuan tertentu dalam memilih sampel ini adalah secara tidak acak.

Jenis dan Sumber Data

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara, data ini didapat dari daftar pustaka atau literatur yang terdahulu. yang bersumber dari dokumen Laporan Realisasi APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui internet. Dari laporan realisasi APBD ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi anggaran Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dari 34 provinsi yang ada di Indonesia yang terletak dipulau Jawa bagian tengah antara provinsi Jawa Timur dan provinsi Jawa Barat, ibukotanya adalah Semarang, provinsi ini berbatasan dengan Samudra Hindia dan daerah istimewa Yogyakarta disebelah selatan dan laut Jawa di sebelah utara.

Secara geografis letak wilayah Jawa Tengah antara 5° 4' dan 8° 3' lintang selatan dan antara 108° 30' dan 111° 30' bujur timur yang berbatasan dengan provinsi Jawa Barat disebelah barat, Samudra Hindia dan daerah istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Jawa Timur disebelah timur dan laut Jawa di bagian utara.

Luas wilayah provinsi Jawa Tengah tercatat 32,801 km² yang meliputi 29 kabupaten dan 6 kota. Provinsi Jawa Tengah meliputi juga meliputi pulau nusakambangan disebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa Barat) serta kepulauan Karimunjawa di laut Jawa. Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten terluas dengan luas 2.124,50 km² atau luas kabupaten tersebut merupakan 6,5% dari total wilayah Jawa Tengah, sementara itu, Kota

Magelang merupakan kota dengan luas wilayah terkecil yaitu 16,10 km². Untuk lebih jelasnya luas daerah menurut kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada table berikut :

Kabupaten / Kota	Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota	
	Persentase 2021	Luas (km ²) 2021
PROVINSI JAWA TENGAH	100.00.00	32800.70
Kabupaten Cilacap	06.50	2124.50.00
Kabupaten Banyumas	04.10	1335.30.00
Kabupaten Purbalingga	02.10	677.50.00
Kabupaten Banjarnegara	03.10	1023.70
Kabupaten Kebumen	0,173611111	1211.70
Kabupaten Purworejo	03.30	1091.50.00
Kabupaten Wonosobo	03.00	981.40.00
Kabupaten Magelang	03.40	1102.90
Kabupaten Boyolali	03.10	1008.50.00
Kabupaten Klaten	02.00	658.20.00
Kabupaten Sukoharjo	01.50	489.10.00
Kabupaten Wonogiri	05.50	1793.70
Kabupaten Karanganyar	02.40	775.40.00
Kabupaten Sragen	0,145833333	941.50.00
Kabupaten Grobogan	06.10	2013.90
Kabupaten Blora	05.50	1804.60
Kabupaten Rembang	0,131944444	887.10.00
Kabupaten Pati	04.50	1489.20.00
Kabupaten Kudus	01.30	425.10.00
Kabupaten Jepara	03.20	1059.20.00
Kabupaten Demak	0,131944444	900.10.00
Kabupaten Semarang	0,145833333	950.20.00
Kabupaten Temanggung	02.50	837.70
Kabupaten Kendal	03.40	1118.10.00
Kabupaten Batang	02.40	788.60
Kabupaten Pekalongan	02.50	837.00.00
Kabupaten Pemalang	03.40	1118.00.00
Kabupaten Tegal	0,131944444	876.10.00

Kabupaten Brebes	0,263888889	1902.40.00
Kota Magelang	00.10	16.10
Kota Surakarta	00.10	46.00.00
Kota Salatiga	00.20	57.40.00
Kota Semarang	01.10	373.80
Kota Pekalongan	00.10	45.20.00
Kota Tegal	00.10	39.70

Sumber : BPS provinsi jawa tengah dalam angka tahun 2021

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa kabupaten cilacap merupakan kabupaten terluas dengan luas 2,124,50 km² atau luas kabupaten cilacap tersebut merupakan 6,5% dari seluruh wilayah jawa tengah. Sementara, kota magelang merupakan kota dengan luas wilayah terkecil yaitu 16,10 km² atau 0.10 % dari wilayah jawa tengah.

Penduduk Jawa Tengah

Jumlah penduduk di setiap provinsi sangat beragam dan bertambah dengan laju pertumbuhan yang sangat beragam. Provinsi jawa tengah adalah jumlah penduduk terbanyak. Di provinsi jawa tengah jumlah penduduk mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2017 jumlah penduduk provinsi jawa tengah 34.257.865 jiwa. Lalu tahun 2020 meningkat dengan jumlah penduduk menjadi 36.516.035 jiwa, sementara itu jumlah penduduk tertinggi di provinsi jawa tengah ialah kabupaten brebes dengan jumlah 1.796.004 jiwa dan jumlah penduduk terendah berada di kota magelang dengan jumlah penduduk 121.474 jiwa pada tahun 2017. Untuk lebih jelasnya, jumlah penduduk menurut kabupaten/kota di provinsi jawa tengah dapat dilihat pada table berikut:

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah diujikan dan pembahasan yang dikemukakan pada bagian sebelumnya maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah bahwa pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal pemerintah provinsi jawa tengah dengan nilai koefisien -5,92 yang artinya apabila variable pendapatan asli daerah tidak mengalami perubahan atau tetap maka anggaran belanja modal provinsi jawa tengah -5,92% dan koefisien regresi sebesar 0,210 yang artinya bahwa setiap kenaikan pendapatan asli 1% menyebabkan tidak berpengaruhnya meningkat belanja modal pemerintah provinsi jawa tengah sebesar 0,210%. Pengaruh signifikan ini dapat diketahui dari nilai t-hitung > t-tabel yaitu

(0,436>0,056) pada alfa 5%(0,05) sedangkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,059 nilai ini menyatakan bahwa belanja modal pemerintah provinsi jawa tengah sebesar 05,9% dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah dan sisanya dipengaruhi oleh variable lain diluar penelitian ini.

6. REFERENSI

- Abdullah, Sukriy. 2004. "Perilaku Oportunis Legislatif dan Penganggaran Daerah : Pendekatan Principal-Agent Theory". *Seminar Antar Bangsa di Universitas Bengkulu*, Bengkulu, 4-5 Oktober 2004.
- Adi, Priyo Hari. 2006. "Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali)". *Simposium Nasional Akuntansi XI*, 1 – 26.
- Drs. Suparmoko, M. Ph. D, M. A. 2002. "Keuangan dan Pembangunan Daerah". *Ekonomi Publik* : Penerbit Andi.
- Drs. Tarigan, M. R. P. 2005. "Teori dan Aplikasi". *Ekonomi Regional* :Penerbit PT Bumi Aksara.
- Halim, Abdul. 2001. "Analisis Deskripsi Pengaruh Fiskal Stress pada APBD Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah". *KOMPAK. STIE YO. Yogyakarta*, 127 – 146.
- Halim, Abdul dan Sukriy Abdullah. 2003. "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali". *Simposium Nasional Akuntansi VI*, 1140 -1159.
- Kuncoro, Mudrajad. Ph. D. 2004. "Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang". *Otonomi dan Pembangunan Daerah* : Penerbit Erlangga.
- Maimunah, Mutiara. 2006. "Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Studi Kasus Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera". *Simposium Nasional Akuntansi XI*, 1- 26.
- Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung. 2005." Suatu Pengantar".
- Teori Ekonomi Makro : Penerbit FE UI.
- Yustikasari, Yulia dan Darwanto. 2007. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,

- Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal“. *Simposium Nasional Akuntansi X*, 1 – 25.
- Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 . Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah.
- Data BPS PDRB provinsi jawa tengah tahun 2017-2021
- Data PUSDARU.JATENGPROV
- Data SPSS 22